



Prosiding Seminar Nasional

“Pengembangan Profesionalisme Dosen dan Guru Indonesia”

<https://semnas.unikama.ac.id/fip/artikel.php>

Vol 2, Tahun 2018 | Halaman 82-88

PPKn dan Etika Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata

Syifa Siti Aulia¹, Dikdik Baehaqi Arif², Iqbal Arpanuddin³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta

Informasi artikel

Kata kunci:

Kewarganegaraan ekologis, PPKn, adiwiyata.

ABSTRAK

Pembentukan kompetensi warga negara salah satunya mengedepankan isu mengenai warga negara dalam partisipasinya mendukung upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi hal yang banyak dikaji saat ini. Metode yang digunakan adalah kajian literature untuk menggali posisi telaahan sebelum dilakukan penelitian sesungguhnya. Lingkungan pendidikan sekolah sebagai bagian dari program formal pendidikan di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pembentukan watak serta peradaban bangsa salah satunya potensi peserta didik untuk dapat menjadi bagian dari warga negara yang ikut berpartisipasi aktif menjaga lingkungan alam dan sekitar. Aktivitas pembelajaran di sekolah baik dalam bentuk kebijakan maupun sampai dengan tahap implementasi hendaknya mampu membentuk warga negara muda yang mempunyai karakter beradab dengan ditandai sikap adil terhadap lingkungan dan sesamanya untuk mendukung terbentuknya warga negara yang berkualitas.

Copyright © 2018 Syifa Siti Aulia¹, Dikdik Baehaqi², Iqbal Arpanuddin³. All Right Reserved

Pendahuluan

Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi elemen yang penting karena warga negara menjadi bagian dari lingkungan hidup sendiri. Isu dampak pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di masa saat ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji terutama pengkajian dengan melihat partisipasi warga negara yang menjadi bagian dari isu tersebut. Dalam perspektif teori *liberal citizenship* dan *republikan citizenship* di Amerika, dikenal *ecological citizenship* (kewarganegaraan ekologi) yang dimulai dengan perilaku individu akan berakibat pada perilaku publik yang berarti hubungan negara-individu didasarkan baik pada kebajikan sipil yang ditujukan untuk melindungi masyarakat, seperti kepatuhan dan keberanian (*republikan citizenship*), atau atas hak warga negara (*liberal citizenship*), kewarganegaraan ekologis adalah hubungan antar-pribadi di antara orang asing (semua kewarganegaraan) yang berdasarkan pada tanggung jawab, kasih sayang dan keadilan sosial, dan yang paling penting ditangkap dalam prinsip “ketika menjalani hidup saya, saya mempengaruhi orang lain, dan kepada orang lain ini saya memiliki kewajiban (terlepas dari apakah mengenal mereka atau tidak)” (Jagers, 2009). Dengan demikian, kewarganegaraan ekologi merupakan kajian tentang bagaimana keterkaitan antar warga negara dan tanggung jawab warga negara yang berhubungan dengan warga negara lainnya, termasuk isu mengenai lingkungan yang menjadi isu global

Pembentukan kompetensi warga negara salah satunya mengedepankan isu mengenai warga negara dalam partisipasinya mendukung upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

menjadi hal yang banyak dikaji saat ini. Salah satu kajian yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi pengetahuan warga negara untuk menjadi warga negara yang berwawasan global sebagaimana diungkapkan dalam salah satu penelitian Gibson, Rimmington, & Landwehr-Brown (2008) bahwa aspek pengetahuan warga negara yang berwawasan global dapat dibentuk antara lain melalui pemahaman multikultural, lingkungan, pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial. Alam dan lingkungan dalam ranah pengetahuan antara lain berkaitan dengan warga negara yang menghargai keberadaan alam dan lingkungan tersebut dengan cara-cara partisipasi aktif warga negara. Partisipasi aktif warga negara dalam menjaga lingkungan harus dimulai terlebih dahulu dengan pemahaman etika lingkungan (*environmental ethic*) yakni keselarasan hubungan manusia dengan alam menjadi bagian penting mengenai etika lingkungan ini. Etika lingkungan ini adalah bagian dari etika lingkungan yang menyangkut karakter terhadap lingkungan (Sandler, 2013).

Isu dampak pencemaran lingkungan hidup dewasa ini salah satunya dapat diatasi dengan partisipasi warga negara secara aktif yakni dilakukan dengan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal (Keraf, 2010). Perubahan cara pandang dan perilaku manusia tidak terlepas dari pembentukan etika dan moralitas warga negara. Pembentukan etika dan moralitas menjadi target utama pelaksanaan pendidikan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Lingkungan pendidikan sekolah sebagai bagian dari program formal pendidikan di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pembentukan watak serta peradaban bangsa salah satunya potensi peserta didik untuk dapat menjadi bagian dari warga negara yang ikut berpartisipasi aktif menjaga lingkungan alam dan sekitar. Aktivitas pembelajaran di sekolah baik dalam bentuk kebijakan maupun sampai dengan tahap implementasi hendaknya mampu membentuk warga negara muda yang mempunyai karakter beradab dengan ditandai sikap adil terhadap lingkungan dan sesamanya untuk mendukung terbentuknya warga negara yang berkualitas.

Proses pembentukan karakter beradab peserta didik dalam kaitannya dengan hubungan peserta didik dengan lingkungan didukung oleh program pemerintah yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pada Tahun 2006 dalam bentuk Program Adiwiyata pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut bertujuan untuk mendorong sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut melaksanakan upaya-upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Di sisi lain, melalui program Adiwiyata di lingkungan pendidikan sekolah diharapkan ikut membantu menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter beradab terhadap lingkungan. Sebagaimana dalam suatu kajian diungkapkan mengenai tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat

pembelajaran dan kesadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung-jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (Handayani, Wuryadi, & Zamroni, 2015).

Metode

Metode yang digunakan adalah kajian literatur untuk menggali posisi telaahan sebelum dilakukan penelitian sesungguhnya. Dengan kajian literatur yang kuat akan menjadi pijakan dalam penelitian selanjutnya. Nazir (2005, hal. 93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh. Pentingnya kajian literatur ini menggambarkan kualitas suatu penelitian dapat dilihat dari bangunan konsep yang termuat dalam kajian pustaka, yang berarti jika kajian pustaka sudah buruk, maka kemungkinan penelitian tersebut juga akan buru (Boote & Beile, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Etika merupakan landasan hidup manusia dengan sekitarnya. Etika memberikan pedoman interaksi antar sesama manusia maupun dengan lingkungan hidupnya. Etika dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, dalam arti yang terbatas etika kemudian berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 2005). Etika memiliki sifat kritis sebagai suatu sifat yang mendasar karena etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku; memiliki dasar norma-norma itu; mempersoalkan hak dari setiap lembaga, seperti orang tua, sekolah, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati (Praja, 2005).

Dari satu sisi, etika membicarakan suatu fakta apa adanya tentang nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya, ini dinamakan dengan etika deskriptif, sedangkan menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini, merupakan sebuah penekanan dari etika normatif (Tanyid, 2014).

Hubungan manusia dan lingkungan bekerja melalui dua cara. Pada satu sisi, manusia dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi pada sisi lain manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan. Karakteristik hubungan tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya atau satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam kaitannya dengan hubungan manusia dan lingkungan, terdapat beberapa paham yang menjelaskan hakikat dari hubungan tersebut, yaitu paham determinisme, paham positivisme dan paham optimisme teknologi.

Permasalahan global di abad 21 telah mengubah dunia begitu cepat yang tidak hanya dialami negara tertentu, melainkan sudah menjadi masalah dunia (Pertiwi & Samsuri, 2017). Cogan dan Derricott mengidentifikasi ada tiga permasalahan global utama yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia yaitu, berkembangnya ekonomi global, semakin pesatnya kemajuan teknologi dan

komunikasi, meningkatnya populasi penduduk dunia yang diikuti dengan munculnya permasalahan lingkungan (1998). Hubungan antara Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan lingkungan hidup dan etika lingkungan berkaitan dengan masalah lingkungan, konsep ekologis dan kesadaran manusia dalam mempengaruhi lingkungan, merencanakan aksi peduli lingkungan, dan kemampuan mengadakan perubahan untuk lingkungan yang lebih baik (McBride, Brewer, Berkowitz, & Borrie, 2013).

Realita dan persoalan yang terjadi bahwa berbagai isu-isu global lingkungan, perlu dilakukan pembelajaran dengan pendekatan pedagogi kritis dalam pembelajaran PPKn. Berbicara tentang PPKn di persekolahan penanaman nilai-nilai lingkungan hidup sudah diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn di dalam formal, tetapi guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya sebatas memberikan materi saja belum sampai menjelaskan mengenai bagaimana praktik menjadi warga negara ekologis yang memiliki pengalaman nilai-nilai dalam melestarikan lingkungan hidup baik di kehidupan masyarakat nantinya (Pertiwi & Samsuri, 2017).

Kebijakan pendidikan lingkungan bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik tentang lingkungan sebagai suatu sistem yang terintegrasi (Aquilina, 2001). Pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran IPA atau Sains, tetapi oleh semua guru mata pelajaran, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dalam kompetensi ekologis.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau sering dikenal dengan istilah PPKn merupakan sarana pendidikan yang memiliki peran untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila. PPKn dan PKn pada dasarnya adalah sama, PPKn adalah sebutan untuk kurikulum 2013, sedangkan PKn adalah sebutan yang lebih umum digunakan dan juga dipakai pada kurikulum KTSP. Sebagai program pendidikan di sekolah, PPKn memiliki tanggung jawab untuk memfokuskan pada penguatan nilai dan moral sebagai perwujudan pendidikan karakter. Sebagai mata pelajaran, PPKn tidak hanya membentuk warga negara yang cerdas saja melainkan menjadi warga negara yang baik.

Sekolah sebagai sarana pendidikan formal bagi manusia untuk membentuk etika dalam hidupnya memiliki peran yang sentral untuk membelajarkan masalah etika. Tidak hanya etika terhadap sesama manusia, juga etika terhadap alam tempat hidupnya. Oleh karena itu sekolah bisa juga menjadi sarana pembentukan etika lingkungan hidupnya. Artinya pembentukan kesadaran akan keberlangsungan lingkungan hidup di mana manusia itu hidup. Kesadaran individu dalam masyarakat tentang lingkungan hidup dan kelestariannya saat ini sangat penting karena kerusakan dan pencemaran yang terus terjadi, kesadaran akan keberlangsungan lingkungan hidup ini harus terus selalu dibelajarkan melalui aksi-aksi penyelamatan lingkungan hidup. Kepedulian lingkungan hidup merupakan wujud sikap mental individu yang direfleksikan dalam perilakunya dan bukan sepenuhnya talenta maupun insting bawaan, akan tetapi juga merupakan hasil dari suatu proses pendidikan dalam arti luas (Hamzah, 2013). Salah asuh atau salah didik terhadap seorang individu bisa jadi akan menghasilkan karakter yang kurang terpuji terhadap lingkungan. Karena itu karakter yang baik haruslah dibentuk kepada setiap individu, sehingga setiap individu dapat menjiwai setiap tindakan dan perilakunya

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang telah menerapkan sistem dengan maksud untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata sendiri telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan berlanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan Adiwiyata kepada sekolah. Pedoman pelaksanaan program Adiwiyata diatur dalam Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2013.

Tujuan sekolah Adiwiyata secara umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (Guru, Murid, Orang Tua wali murid, dan warga masyarakat) dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; mendorong dan membantu sekolah agar dapat ikut melaksanakan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang; warga sekolah turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa kajian penelitian di Indonesia telah banyak yang mengungkapkan mengenai pembentukan kesadaran cinta lingkungan melalui lingkungan pendidikan. Salah satu asumsi berangkat dari pemikiran bahwa pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah merupakan modal dasar bagi pembentukan etika lingkungan pada lintas generasi (Mulyana, 2009). Kajian tersebut memberikan gambaran bahwa lingkungan sekolah sebagai aset potensial untuk membentuk warga negara yang aktif berpartisipasi dalam upaya menjaga lingkungan. Penelitian lainnya mengenai upaya integrasi bidang studi atau mata pelajaran salah satunya hasil penelitian yang mengungkapkan pola pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup ke dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dengan hasil kajian yang mengungkapkan bahwa tidak bisa dilakukan begitu saja, namun harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup ke dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dilakukan dengan cara mengkaji standar isi pembelajaran IPS di sekolah dasar yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 (Afandi, 2013).

Selain itu banyak sekali penelitian yang relevan di Indonesia yang berupaya mengungkapkan mengenai pentingnya pengembangan etika lingkungan untuk peserta didik di sekolah, namun dalam kajian penelitian lain diungkapkan mengenai integrasi kegiatan PLH yang tidak terintegrasi di mata pelajaran tertentu dalam salah satu kajian di sekolah dasar diungkapkan bahwa kegiatan PLH yang dilakukan oleh sekolah tampak tidak terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu, sehingga paradigma integratif tidak kelihatan. Secara formal sekolah menempatkan PLH terintegrasi pada mata pelajaran tersebut, tetapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan secara eksklusif dipisahkan menjadi kegiatan tersendiri. Konsep integrasi hanya bisa dilaksanakan menyangkut konsep-konsep dasar PLH dengan cara menyisipkan ke materi-materi melalui mata pelajaran tersebut (Handayani dkk., 2015).

Beberapa kajian penelitian di atas memberikan gambaran bagi peneliti saat ini untuk mengkaji integrasi etika lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pendidikan lingkungan hidup

melalui mata pelajaran PPKn di lingkup wilayah sekolah menengah. Pada dasarnya program sekolah adiwiyata menjadi program kementerian lingkungan hidup yang konsisten untuk membantu proses pelestarian lingkungan di lingkup pendidikan berdasarkan beberapa hasil evaluasi program pelaksanaan sekolah adiwiyata di beberapa sekolah ditemukan beberapa hal dalam implementasinya bahwa kebijakan lingkungan hidup di sekolah sudah dituangkan dalam surat keputusan dan terintegrasi dalam masing-masing mata pelajaran. Kemudian menyosialisasikan beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada siswa guna mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan kesepakatan yang mutlak bahwa sekolah tersebut benar-benar sekolah berwawasan lingkungan. Selanjutnya masih dijumpai berbagai situasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan adiwiyata, seperti satuan tugas yang tidak tepat waktu serta ada sekelompok siswa yang masih belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup, masalah pendanaan, dan dukungan masyarakat serta instansi lain yang masih rendah. (Landriany, 2014). Sekolah berwawasan lingkungan dengan prinsip penguatan etika lingkungan menjadi hal yang seharusnya dapat diimplementasikan melalui mata pelajaran PPKn.

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang dikembangkan di lingkungan pendidikan formal sekolah memiliki andil dalam membantu terlaksananya program Adiwiyata sebagai bentuk pendidikan lingkungan hidup. PPKn dengan pengembangannya sebagai mata pelajaran di sekolah memiliki tugas membantu peserta didik untuk memiliki kompetensi partisipasi warga negara beradab terhadap lingkungan. Berdasarkan satu kajian mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal yang dapat membuat seseorang individu melek lingkungan menurut Simmon (McBride et al., 2013) yakni: (1) terkait dengan masalah lingkungan (moralitas); (2) Berkomunikasi dan menerapkan konsep ekologis; (3) Bagaimana kesadaran manusia dalam mempengaruhi lingkungan; (4) Pengetahuan tentang isu-isu lingkungan; (5) Kemampuan untuk menciptakan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan rencana aksi/kegiatan; (6) Mendorong praktik dan mendukung kebijakan ramah lingkungan; (7) Kemampuan untuk memajukan suatu perubahan.

PPKn dan pengembangannya di lingkungan sekolah sebagai bentuk pendidikan nilai, moral dan watak memiliki andil dalam pembentukan melek lingkungan sebagaimana dikemukakan bahwa "...PPKn di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan warga yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai warga negara untuk kemajuan diri dan lingkungannya" (Wahab & Sapriya, 2011). Sehingga pengembangan pembelajaran PPKn di persekolahan seharusnya menjadi bagian yang terintegrasi dari program adiwiyata sekolah dan dapat dikembangkan untuk membentuk peserta didik sebagai bagian dari warga negara yang demokratis dalam melestarikan lingkungan.

Simpulan

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang dikembangkan di lingkungan pendidikan formal sekolah memiliki andil dalam membantu terlaksananya program Adiwiyata sebagai bentuk pendidikan lingkungan hidup. PPKn dengan pengembangannya sebagai mata pelajaran di sekolah memiliki tugas membantu peserta didik untuk memiliki kompetensi partisipasi warga negara beradab terhadap lingkungan.

Daftar Rujukan

- Afandi, R. (2013). Integrasi pendidikan lingkungan hidup melalui pembelajaran IPS di sekolah dasar sebagai alternatif menciptakan sekolah hijau. *Pedagogia*, 2(1), 98–108.
- Aquilina, J. (2001). *Environmental education policy for schools: NSW Department of Education and Training Curriculum Support Directorate*. New South NSW England: Minister for Education New South NSW.
- Bertens, K. (2005). *Etika* (9 ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers : On the centrality of the dissertation literature review in research preparation. *Educational Researcher*, 34(6), 3–15. <https://doi.org/10.3102/0013189x034006003>
- Cogan, J. J. (1998). Citizenship Education for the 21st Century: setting the context. In J. J. Cogan & R. Derricott (Ed.), *Citizenship for the 21 st Century: An Introduction Perspectives on Education* (hal. 1–20).
- Gibson, K. L., Rimmington, G. M., & Landwehr-Brown, M. (2008). Developing global awareness and responsible world citizenship with global learning. *Roeper Review: A Journal on Gifted Education*, 30(1), 11–23. <https://doi.org/10.1080/02783190701836270>
- Hamzah, S. (2013). *Pendidikan lingkungan sekelumit wawasan pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Handayani, T., Wuryadi, & Zamroni. (2015). Pembudayaan nilai kebangsaan siswa pada pendidikan lingkungan hidup sekolah dasar Adiwiyata mandiri. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 3(1), 95–105. Diambil dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/7815>
- Jagers, S. C. (2009). In search of the ecological citizen. *Environmental Politics*, 18(1), 18–36. <https://doi.org/10.1080/09644010802624751>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Landriany, E. (2014). Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 2, 82–88.
- McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, W. T. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: what do we mean and how did we get here? *Ecosphere*, 4(5), 1–20.
- Mulyana, R. (2009). Penanaman etika lingkungan melalui sekolah perduli dan berbudaya lingkungan. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*, 6(2), 175–180.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pertiwi, S., & Samsuri. (2017). Pembentukan kompetensi ekologis dengan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dalam PPKn di SMP. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 154–165.
- Praja, J. S. (2005). *Aliran-aliran filsafat & etika*. Jakarta: Prenada Media.
- Sandler, R. L. (2013). Environmental virtue ethics. In H. LaFollette (Ed.), *The international encyclopedia of ethics* (hal. 1665–1674). West Sussex: Blackwell Publishing Ltd.
- Tanyid, M. (2014). Etika dalam pendidikan: kajian etis tentang krisis moral berdampak pada pendidikan. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 235–250.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.